



Kebijakan *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) oleh Kementerian Pertahanan Jepang sebagai bentuk penyeimbang kekuatan Cina dalam Indo-Pasifik

Muhammad Ikhwan Hakiki¹⁾, Yoga Gustafianto²⁾

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, Indonesia

hakikiikhwan87@gmail.com¹⁾
yogugustafianto@gmail.com²⁾

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Free and Open Indo Pacific (FOIP) oleh Kementerian Pertahanan Jepang sebagai bentuk penyeimbang kekuatan Cina dalam Indo-Pasifik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti dokumen resmi, buku ilmiah, dan jurnal akademik. Kerangka teoritis penelitian ini menggunakan teori neorealisme, konsep kerja sama internasional dan balancing untuk memahami upaya Kementerian Pertahanan melalui FOIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi FOIP oleh Kementerian Pertahanan Jepang sebagai bentuk penyeimbang kekuatan Cina di Indo-Pasifik secara tidak langsung dapat menjadi penyeimbang kekuatan Cina dan menciptakan tatanan wilayah yang lebih stabil melalui kerja sama ini. FOIP juga bukan hanya upaya diplomatic tetapi juga sebuah pendekatan yang menyeluruh untuk mengatasi masalah yang ada.

Kata kunci: *Free and Open Indo Pacific*, Jepang, Indo-Pasifik, Kerja Sama Internasional, *Balancing*

Abstract

This article aims to analyze the implementation of the Free and Open Indo-Pacific (FOIP) policy by the Ministry of Defense of Japan as a form of balancing against China's growing power in the Indo-Pacific. This research employs a descriptive qualitative method, with data collection techniques conducted through literature studies from various sources, including official documents, scholarly books, and academic journals. The theoretical framework of this research utilizes neorealism, the concept of international cooperation, and balancing to understand the Ministry of Defense's efforts through the FOIP initiative. The results indicate that the implementation of FOIP by Japan's Ministry of Defense serves as a strategic counterweight to China's influence in the Indo-Pacific. Indirectly, this policy facilitates power balancing and fosters a more stable regional order through defense cooperation. Furthermore, FOIP is not merely a diplomatic endeavor but represents a comprehensive approach to addressing multifaceted security challenges in the region.

Key words: *Free and Open Indo Pacific*, Japan, Indo-Pacific, International Cooperation, *Balancing*

PENDAHULUAN

Secara historis, istilah "Indo-Pasifik" sebagai kontruksi geopolitik pertama kali diartikulasikan oleh Karl Haushofer pada tahun 1924. Meski demikian, diskursus geopolitik pasca Perang Dunia II sempat didominasi oleh paradigma "Asia Pasifik" yang sangat dipengaruhi oleh proyeksi kekuatan ekonomi dan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut (Li, 2022). Konsep ini mencakup wilayah yang menghubungkan Asia Timur Laut, Asia Tenggara, Oceania (termasuk Australia), dan Amerika Serikat. Namun, istilah ini baru menjadi populer setelah Perang Dunia II.



Perubahan dari konsep Asia-Pasifik menjadi Indo-Pasifik disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, istilah "Asia" dianggap terlalu luas dan mengacu pada wilayah kontinental daripada Samudra Hindia (Li, 2022). Kedua, kebangkitan India sebagai kekuatan ekonomi dan militer dengan kepentingan di luar Asia Selatan (Fathirahma, 2020). Ketiga, ada peningkatan hubungan antara kekuatan ekonomi Asia Timur dan wilayah Samudra Hindia, terutama dalam hal kebutuhan energi dan sumber daya.

Secara umum, "Indo-Pasifik" adalah area imajiner yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Asia-Pasifik. Istilah ini tidak baru, tetapi negara-negara di sekitar wilayah tersebut telah menjadi lebih tertarik padanya karena pergeseran geopolitik di wilayah tersebut. Setiap negara dari "Quad" (Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia) yang terlibat dalam Dialog Keamanan Quadrilateral informal telah memberikan perspektif unik mereka tentang wilayah Indo-Pasifik (Yudhistira, 2024). ASEAN telah mengembangkan "Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik" sebagai bagian dari hubungannya dengan "Indo-Pasifik". Namun, penilaian yang dilakukan oleh *Asia Strategy Initiative* (ASI) menunjukkan bahwa ada perbedaan besar dalam cakupan geografis Indo-Pasifik. Sementara Amerika Serikat mendefinisikan Indo-Pasifik sebagai seluruh Samudra Hindia dari pantai timur Afrika hingga Amerika Serikat, Jepang, Australia; dan India mendefinisikan Indo-Pasifik sebagai seluruh wilayah yang diawasi oleh Komando Indo-Pasifik (MOFA Japan, 2019). ASEAN melihatnya sebagai wilayah yang saling terhubung dan terintegrasi, bukan wilayah yang bersebelahan.

Wilayah Indo-Pasifik dapat didefinisikan baik secara luas, yang mencakup wilayah geografis antara pantai barat Amerika Serikat dan pantai timur Afrika, atau lebih sempit, didefinisikan sebagai area segitiga dengan Jepang, Australia, dan India di setiap ujungnya dalam sebagian besar diskusi geostrategis. Beberapa negara telah menyuarakan pendapat mereka tentang pembangunan Indo-Pasifik. Pendapat-pendapat ini mencerminkan cara-cara yang berbeda dalam memahami masalah yang ada di wilayah tersebut dan cara-cara untuk menyelesaiakannya. Konsep Indo-Pasifik telah ada setidaknya sejak Agustus 2007, ketika perdana menteri Jepang Shinzo Abe pertama kali menyarankan untuk membuat "pertemuan dua lautan" antara lautan Hindia dan Pasifik untuk mengembangkan kerja sama dengan tujuan memastikan wilayah Indo-Pasifik 'Free and Open' untuk barang publik internasional (Brown, 2018).

Jepang adalah negara kepulauan yang telah lama menganut pasifisme dan mengklaim dirinya sebagai negara pasifis. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang menolak menggunakan militer sebagai cara menyelesaikan konflik internasional dalam konstitusinya. Jepang menganut dua jenis pasifisme, yang pertama menolak untuk melakukan apa pun yang dapat membantu perdamaian selama perang, dan yang kedua menolak untuk menggunakan kekuatan militer untuk mencapai perdamaian (Laksono, 2018). Ini tercermin dalam identitas pasifis Jepang, yang menekankan perdamaian, menolak kekerasan, dan berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Selain itu, sikap Jepang terhadap konflik dan kebijakan luar negeri menunjukkan pasifismenya, dengan tekanan diplomasi, kerja sama internasional, dan menolak menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi konflik. Identitas ini telah menjadi ciri khas Jepang dalam hubungan internasional dan berdampak pada berbagai bagian kebijakan luar negerinya, terutama dalam hal keamanan dan perlindungan (Mustaqim, 2019).

Kawasan Indo-Pasifik menghadapi banyak tantangan transnasional yang membutuhkan kerja sama multilateral, seperti perubahan iklim, keamanan maritim, terorisme, dan keamanan siber. Namun, ketidaksepakatan geopolitik antara Amerika Serikat dan Cina menyebabkan polarisasi di wilayah tersebut, yang membuat negara-negara yang tidak mau memihak khawatir. Seperti yang ditunjukkan oleh pernyataan resmi ASEAN dan strategi Prancis yang menekankan pengurangan dampak persaingan bilateral, ASEAN dan Prancis menawarkan "jalan ketiga" melalui visi Indo-Pasifik yang inklusif yang berfokus pada diskusi dan kerja sama pragmatis.

Jepang berusaha memperkuat posisinya sebagai poros regional, yang akan berdampak besar pada perdamaian dan stabilitas di wilayah Indo-Pasifik, termasuk mitra dan sekutu dekat Jepang. Jepang berusaha untuk mempertahankan dan memperluas perannya dalam menyeimbangkan kekuatan Cina dengan memobilisasi sumber dayanya dan memperkuat



keterhannanya. Mereka melakukan ini dengan mendukung sistem regional yang adil dan stabil. Ini meningkatkan nilainya sebagai mitra dan sekutu bagi negara lain yang mengejar tujuan yang sama. Jepang tidak dapat bersaing secara langsung dengan Cina dan Amerika Serikat dalam hal material, tetapi negara itu masih dapat memanfaatkan sumber daya nasionalnya yang luar biasa untuk mendukung upaya ini. Dengan cara apa pun, para pembuat kebijakan Jepang telah menyatakan komitmen mereka untuk "mengembalikan keseimbangan strategis regional" (Watanabe, 2025).

Pada *Tokyo International Conference on African Development* (TICAD VI), yang diadakan di Kenya, Agustus 2016, Perdana Menteri Shinzo Abe memberikan pidato penting tentang konsep *Free and Open Indo-Pacific* (Abe, 2016). Tujuan dari rencana ini adalah untuk meningkatkan "konektivitas" antara Asia dan Afrika melalui Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, yang akan menghasilkan stabilitas dan kesejahteraan di seluruh wilayah tersebut. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mulai menerapkan strategi pasif proaktif dalam kebijakan luar negeri (Laksono, 2018). Ini mencakup kebijakan keamanan dan pelestarian, Jepang ingin membangun pencegahan militer yang lebih baik dan aliansi keamanan dengan negara-negara lain. Abe berpendapat bahwa jika Jepang dan India dapat mencapai persatuan dengan metode ini, Asia akan berkembang menjadi jaringan yang lebih luas yang mencakup seluruh Samudera Pasifik, termasuk Amerika dan Australia. Pandangan Abe berfokus pada keamanan, ekonomi, dan laut Kawasan Indo-Pasifik (Fathirahma, 2020).

Karena letaknya di persimpangan jalur perdagangan internasional, wilayah Indo-Pasifik langsung menarik perhatian ketika istilah ini pertama kali digunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kehadiran dan pengaruh negara-negara besar di Kawasan Indo-Pasifik, seperti Amerika Serikat, Cina, India, Australia, Jepang, dan negara-negara anggota ASEAN. Salah satu pusat geopolitik dunia di Indo-Pasifik adalah dinamika di Laut Cina Selatan (Amelia, 2023). Keterbukaan adalah komponen utama FOIP karena memungkinkan orang, barang, modal, dan ilmu pengetahuan mengalir dengan bebas. kebebasan yang lebih besar di Asia dan kerja sama antara AS, Australia, India, dan Jepang (MOFA Japan, 2019).

Visi FOIP Jepang memiliki tiga pilar utama: penegakan supremasi hukum, kebebasan navigasi, dan perdagangan bebas; peningkatan konektivitas melalui proyek infrastruktur berkualitas untuk kemakmuran; serta kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan melalui bantuan kemanusiaan, penanganan bencana, dan pembangunan kapasitas (MOFA Japan, 2019). FOIP dirancang sebagai tandingan fleksibel terhadap Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) Cina, dengan Jepang menawarkan pendanaan infrastruktur melalui Partnership for Quality Infrastructure yang menjanjikan USD 110 miliar untuk investasi infrastruktur berkualitas di Asia selama lima tahun dengan fokus pada transparansi, keberlanjutan lingkungan, dan standar etik. Meskipun skalanya lebih kecil dibandingkan BRI, FOIP bertujuan memberi alternatif bagi negara-negara Asia untuk mengurangi ketergantungan pada Cina (Watanabe, 2019).

Di sisi lain, Quad (Jepang, AS, Australia, India) merupakan inisiatif minilateral yang bertujuan menahan ekspansi Cina di Indo-Pasifik. Meskipun gagal di fase awal (2007) karena dianggap provokatif, Quad 2.0 (2017) lebih diterima karena perbedaan persepsi anggota terhadap Cina (Yudhistira, 2024). Namun, koordinasi operasional masih terbatas, dan kelompok ini lebih berfungsi sebagai forum dialog daripada aliansi militer formal. Strategi Jepang menggabungkan pendekatan multilateral dan minilateral. Dalam hal multilateral, Jepang mendorong adopsi standar infrastruktur global di G-20, mempertahankan CPTPP pasca-penarikan AS, dan menjalin kemitraan ekonomi dengan UE. Sementara itu, pendekatan minilateral berfokus pada Quad dan jaringan keamanan regional untuk mengimbangi pengaruh Cina. FOIP juga berupaya melibatkan negara ASEAN yang enggan memihak AS-Cina dengan menekankan inklusivitas. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara aspirasi multilateral dan kebutuhan membangun koalisi strategis yang terbatas (Pajon, 2019).

Berdasarkan dari kemampuan dan posisinya, Jepang dapat dianggap sebagai negara menengah yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung perdamaian dan mengurangi dominasi negara besar di kawasan Indo Pasifik. Ini sesuai dengan tujuan Free and Open Indo-



Pacific, yang bertujuan untuk membuat wilayah stabil dan makmur melalui penegakan hukum internasional, pencegahan konflik, dan kerja sama pembangunan. Target Perdana Menteri Abe adalah menyatukan wilayah Indo-Pasifik sebagai area yang terhubung secara strategis dengan menggunakan FOIP untuk mengatasi ancaman dan membangun tatanan regional yang adil. Melalui metode ini, Jepang tidak hanya mendukung infrastruktur berkualitas tinggi dan kolaborasi yang inklusif, tetapi juga memperkuat peranannya sebagai penggerak stabilitas melalui diplomasi normatif dan *soft power*.

Transformasi postur pertahanan Jepang dalam kerangka Indo-Pasifik tidak lagi sekedar retorika diplomatik, melainkan telah bermanifestasi menjadi strategi *internal balancing* yang agresif melalui revisi tiga dokumen utama keamanan pada Desember 2022, yakni *National Security Strategy* (NSS), *National Defense Strategy* (NDS), dan *Japan's Defense Buildup Plan* (BDP). Jika sebelumnya Jepang hanya berfokus pada pertahanan defensive murni (*senshu boei*), kebijakan konkret Kementerian Pertahanan Jepang kini secara eksplisit mengadopsi *counter-strike capability* sebagai bentuk pencegahan aktif terhadap ancaman rudal Cina. Langkah ini menandai pergeseran fundamental dari yang sebelumnya “menolak kekuatan militer”, menuju postur yang mengakui bahwa *military deterrence* diperlukan untuk menjaga *status quo* regional dan mencegah koersi sepihak di kawasan Indo-Pasifik (Hughes, 2023).

Dalam penelitian terdahulu, Nadirah dan Yusuf (2021) di dalam Jurnal Geopolitik dan Hubungan Internasional yang berjudul Kebijakan Free and Open Indo-Pacific (FOIP) Jepang: Implikasinya Terhadap Keamanan Maritim Indonesia. Penelitian tersebut memfokuskan pada kebijakan FOIP berimplikasi positif pada peningkatan kapasitas keamanan maritim Indonesia melalui bantuan teknis dan hibah kapal patroli atau teknologi pemantauan laut dari Jepang. Selain itu Indonesia juga mendapatkan keuntungan dari adanya diversifikasi mitra strategis, sehingga tidak terjebak dalam dominasi satu kekuatan besar saja. Dalam penelitian ini menunjukkan adanya titik temu antara *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) yang diusung Indonesia dengan FOIP Jepang, terutama dalam aspek inklusivitas dan kerjasama ekonomi maritim. Sedangkan dalam penelitian kami, memfokuskan pada implementasi kebijakan FOIP Jepang sebagai penyeimbang kekuatan Cina di Indo-Pasifik. Dari hasil penelitian Nadirah dan Yusuf, kami melihat bahwa hasil penelitian mereka merupakan penguatan hasil penelitian kami. Dimana peningkatan kapasitas maritim Indonesia adalah salah satu dari kebijakan FOIP Jepang untuk melakukan penyeimbang kekuatan dengan Cina di Indo-Pasifik.

Pada penelitian yang lain, Sheila A. Smith (2019) di dalam Harvard University Press dengan judul *Japan Rearmed: The Politics of Military Power*. Dalam penelitiannya Sheila menyimpulkan beberapa poin kunci mengenai pergeseran fokus strategis, dimana Jepang telah secara resmi menggeser orientasi pertahanannya dari Utara (warisan Perang Dingin melawan Uni Soviet) kearah Barat Daya (untuk membendung ekspansi maritim Cina di Kepulauan Senkaku dan Laut Cina Timur). Poin yang ke-2 integrasi sipil-militer dalam kebijakan Jepang, militer jepang kini lebih terintegrasi dalam struktur politik yang terpusat melalui pembentukan *National Security Council* (NSC), yang memperkuat peran kementerian terkait dalam strategi nasional. Poin ke-3 penguatan aliansi sebagai *deterrence*, peningkatan kemampuan *Japan Ministry of Defense* (JMOD) untuk memperkuat kontribusi Jepang terhadap aliansinya dengan AS (QUAD). Selain itu peningkatan kekuatan militer Jepang juga merupakan respon atas kegagalan diplomasi dalam menyelesaikan sengketa wilayah dan ancaman rudal di kawasan.

Penelitian akan menjawab pertanyaan mengenai Implementasi Kebijakan *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) oleh Kementerian Pertahanan Jepang sebagai bentuk penyeimbang kekuatan Cina dalam Indo-Pasifik tahun 2023.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian studi kasus. Pemilihan studi kasus dipandang tepat karena mampu menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai sebuah peristiwa, dengan mempertimbangkan berbagai dimensi baik hukum, politik, sosial, maupun keamanan. Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan *Free and*



Open Indo-Pacific (FOIP) oleh Kementerian Pertahanan Jepang sebagai bentuk penyeimbang kekuatan Cina dalam Indo-Pasifik, kami terlibat dalam siklus analisis yang berulang seperti *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verificarion* yang dimana ini dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1994). Adapun teori yang peneliti pakai adalah neorealis, dimana Waltz berpendapat bahwa negara tidak dapat mempercayai satu sama lain dalam anarki; sebaliknya mereka harus melakukan pertahan diri, atau self-help, untuk keamanan. Sejalan dengan itu, Hobbes menambahkan bahwa negara harus membangun kekuatan militer dan aliansi strategis. Untuk mengupas lebih dalam mengenai implementasinya, kami menggunakan konsep kerja sama internasional dan balancing. Kerja sama internasional sendiri untuk menjelaskan perilaku Jepang yang melakukan kerja sama dengan beberapa negara untuk menciptakan perdamaian bagi negaranya. Kerja sama internasional menjelaskan bahwa negara tidak akan selalu bertindak unilateral, melainkan dapat membentuk kolaborasi apabila terdapat persepsi keuntungan bersama, biaya rendah, serta mekanisme kepercayaan (*trust-building mechanisms*). Konsep yang kedua adalah balancing, dimana Walt mengidentifikasi empat faktor ancaman utama yang mendorong negara untuk menggunakan strategi balancing, yaitu aggregate power, geographic proximity, offensice power, dan aggressive intension. Balancing sendiri menurut Walt digunakan negara karena dua alasan. Pertama, ketika mereka merasa terancam oleh negara lain yang berpotensi menjadi hegemoni atau mendominasi, yang kedua adalah untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam aliansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dibalik upaya Jepang terhadap kekuatan Cina di kawasan Indo-Pasifik, terdapat dua peristiwa ekonomi dan keamanan di tahun 2010-an memicu lahirnya FOIPS. Pertama, pada tahun 2013, Presiden Cina Xi Jinping memperkenalkan *Belt and Road Initiative* (BRI) untuk memperkuat pengaruh Cina melalui pembangunan infrastruktur global (Xi Jinping, 2013). Meskipun awalnya negara-negara Barat kurang merespon karena fokus pada *Trans-Pacific Partnership* (TPP), kehadiran *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) pada tahun 2014 menimbulkan kekhawatiran di AS mengenai standar internasional yang mungkin diabaikan dalam praktik pembangunan (Waqaf Ilmu Nusantara, 2021). Banyak negara Asia, seperti Malaysia, Indonesia, dan Pakistan, menunjukkan minat untuk berkolaborasi dengan Cina karena kebutuhan investasi infrastruktur mereka, menjadikan BRI bagian penting dari kebijakan luar negeri Cina (Waqaf Ilmu Nusantara, 2021). Kedua, pada Juli 2016, Pengadilan Arbitrase mengeluarkan putusan terkait sengketa Laut Cina Selatan yang ditolak oleh Cina, menciptakan ketidakpastian di kawasan. Kegagalan ASEAN untuk mencapai konsensus mengenai putusan tersebut menunjukkan keterbatasan hukum internasional dalam menangani tindakan sepihak Cina. Hal ini mendorong Jepang untuk memperkuat aliansi dengan AS dan membangun koalisi dengan negara-negara sejalan di Asia dan Eropa, sambil tetap menekankan prinsip-prinsip internasional tanpa secara langsung menargetkan Cina (Adi, 2020).

Strategi FOIP Jepang bertujuan untuk memperkuat kerjasama keamanan regional, menjunjung tinggi hukum internasional, dan meningkatkan keamanan maritim di Indo-Pasifik, yang mencakup mengatasi masalah seperti sengketa teritorial dan kebebasan navigasi. Seiring meningkatnya persaingan AS-Cina, kekhawatiran keamanan juga muncul mengenai potensi konflik militer atau insiden di daerah-daerah seperti Laut Cina Timur dan Selatan, dengan implikasi yang tidak jelas bagi Jepang (Sulaeman, 2020). Perilaku tegas Cina di kawasan itu menimbulkan tantangan bagi visi FOIP Jepang. Akibatnya, Jepang memutuskan untuk melakukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kemampuan keamanannya, seperti memperluas anggaran pertahanannya, memperdalam kemitraan keamanan dengan negara-negara lain, dan merevisi strategi keamanan nasionalnya pada akhir tahun 2022. Namun, akselerasi kapabilitas pertahanan Jepang tersebut berisiko memicu persepsi ancaman di pihak Cina, yang secara sistemik berpotensi mengekskalasi dilema keamanan antar kedua negara. Untuk memitigasi deficit kepercayaan dan instabilitas kawasan, Jepang dituntut untuk menginisiasi dialog kemanan strategis serta mengimplementasikan *Confidence Building Measure* (CBMs) dalam kerangka arsitektur



keamanan kooperatif regional yang bersifat inklusif terhadap Cina (Karisma et al., 2025).

Pada masa pemerintahan Shinzo Abe, Jepang mengimplementasikan kebijakan Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka (FOIP) melalui berbagai strategi inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas, keamanan, dan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik (Abe, 2016). Salah satu langkah konkretnya adalah investasi Jepang dalam strategi pembangunan infrastruktur pada tahun 2016 di negara-negara seperti Kamboja, Indonesia, Papua Nugini, dan Sri Lanka. Tujuan dari pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara adalah untuk meningkatkan konektivitas dan memperkuat hubungan ekonomi antara negara-negara ASEAN meningkatkan kemampuan mereka dalam menjaga keamanan maritim dan melindungi jalur pelayaran yang sangat penting untuk perdagangan internasional. Tidak sampai disitu, Jepang terus membangun kerjasamanya dengan ASEAN melalui diplomasi pertahanan dan bantuan pembangunan (ODA) untuk meningkatkan tata kelola maritim dan keamanan di wilayah tersebut. Program Inisiatif Kerja Sama Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri 2.0, yang diumumkan oleh Motegi Toshimitsu, Menteri Luar Negeri Jepang, pada tahun 2018, merupakan salah satu inovasi penting. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Asia Tenggara melalui pelatihan dan inovasi teknis serta peningkatan pengetahuan dasar di bidang matematika dan sains (MOD Japan, 2024).

Jepang juga mempererat hubungan dengan Amerika Serikat melalui latihan gabungan seperti *Indo-Pacific Deployment* (IPD) yang dilakukan sejak tahun 2019 pada masa pemerintahan Shinzo Abe dan akhirnya pada tahun 2022 memberikan bantuan pengembangan kapasitas kepada Vietnam dalam bidang kedokteran selam yang dilaksanakan di masa pemerintahan Fumio Kishida. Latihan gabungan IPD merupakan salah satu cara Jepang dan AS meningkatkan interoperabilitas militer mereka. Latihan ini melibatkan berbagai skenario yang dirancang untuk meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata kedua negara dalam menghadapi ancaman di kawasan, termasuk dari negara-negara seperti Cina dan Korea Utara.

Disisi lain, Jepang juga aktif berpartisipasi dalam Quad, sebuah forum strategi yang terdiri dari Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat, yang membahas upaya bersama untuk mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Inisiasi mekanisme Quad pertama kali dicetuskan oleh Shinzo Abe pada tahun 2007, yang akhirnya mengalami signifikansi pada tahun 2017. Delegasi senior dari keempat negara mengadakan pertemuan di sela-sela KTT ASEAN tahun 2017 untuk memformalkan kerja sama quadrilateral tersebut, dengan fokus utama pada arsitektur keamanan dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik (Yudhistira, 2024). Para menteri luar negeri dari keempat negara mengadakan pertemuan penting di Jepang pada tanggal 6 Oktober 2020. Dalam pertemuan ini, mereka menekankan betapa pentingnya kerja sama untuk membangun tatanan kawasan yang berdasarkan aturan, terutama dalam konteks perlindungan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 dan peningkatan kekuatan Cina. Pertemuan di Jepang pada Oktober 2020 tersebut menandai pertemuan perdana di tingkat Menteri sejak eskalasi pandemic COVID-19, yang sekaligus berfungsi sebagai sinyal diplomatik mengenai solidaritas kemitraan strategis Quad (Dobrinskaya, 2022).

Jepang dan negara lain sebagai negara *middle power* menyadari bahwa, dibandingkan dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Cina, mereka tidak memiliki kemampuan material yang cukup. Akibatnya, Jepang secara strategis menggunakan *soft power* dan diplomasi untuk mencapai tujuan Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka (FOIP). Dari sudut pandang neorealisme, tindakan Jepang ini dianggap logis dan pragmatis, dengan tujuan mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam struktur internasional yang tidak stabil karena menyoroti bagaimana struktur anarki dalam sistem internasional memaksa negara untuk mengutamakan *self-help* dan menjaga keseimbangan kekuatan. Jepang, yang dihadapkan pada peningkatan kekuatan ekonomi dan militer Cina, berusaha mempertahankan posisi dan stabilitas regional.

Dapat dilihat jika strategi ini selaras dengan konsep *Balancing* digunakan Jepang, melakukan penyeimbangan internal dengan meningkatkan kemampuan militernya sendiri untuk meningkatkan daya saingnya terhadap potensi ancaman, dan upaya penyeimbangan eksternal dengan membangun dan memperkuat aliansi dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan



serupa, seperti Amerika Serikat, Australia, dan India melalui Quad. Menurut teori neorealisme yang dibahas dalam tulisan ini, keseimbangan adalah respons rasial terhadap ancaman. Jepang menyadari bahwa, di tengah meningkatnya pengaruh Cina, mereka harus 'mengembalikan keseimbangan strategi regional', mengacu pada visi FOIP yang dicanangkan Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2016.

Melalui FOIP, Jepang berupaya menciptakan tatanan regional yang lebih stabil dan mencegah hegemoni Cina yang berpotensi mengancam kepentingan nasionalnya. Melalui visi Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka (FOIP), Jepang berusaha mempertahankan sistem internasional yang menguntungkannya secara ekonomi dan strategi dengan tiga pilar utama: penegakan supremasi hukum, kebebasan navigasi, dan perdagangan bebas; perbaikan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur berkualitas tinggi; dan kontribusi perdamaian dan perdamaian melalui bantuan kemanusiaan, penanganan bencana, dan pembangunan kapasitas. Upaya kerjasama internasional yang dilakukan Jepang bisa dilihat dari investasi pembangunan infrastruktur terhadap Kamboja, Indonesia, Papua Nugini, dan Sri Langka dalam pembangunan jalan, Pelabuhan, dan bandara. Hal ini penting karena bagian dari implementasi kebijakan FOIP dalam meningkatkan konektivitas dan memperkuat hubungan ekonomi antara negara-negara di kawasan. Hal ini dimaksudkan oleh Jepang untuk menciptakan kawasan yang stabil dan makmur, serta mengurangi ketergantungan negara-negara Indo-Pasifik di Cina karena inisiatif *Belt and Road Initiative* (BRI).

Pembahasan

Revisi tiga dokumen keamanan utama Jepang pada Desember 2022 - *National Security Strategy* (NSS), *National Defense Strategy* (NDS), dan *Japan's Defense Buildup Plan* (BDP) – menandai titik balik paling radikal dalam postur pertahanan Jepang sejak berakhirnya Perang Dunia II. Dalam dokumen tersebut, Jepang secara eksplisit mendefinisikan Cina sebagai "tantangan strategis terbesar," sebuah pergeseran fundamental dari paradigma dokumen tahun 2013 (Ministry of Defense Japan, 2023). Perubahan fundamental ini terwujud dalam penerapan *counter-strike capability* yang memungkinkan Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) untuk menyerang pangkalan rudal lawan dalam situasi darurat. Langkah ini secara teoritis menggeser doktrin *Senshu Boei* (pertahanan eksklusif) menuju bentuk pencegahan aktif, dimana Jepang tidak lagi hanya mengandalkan "perisai" terhadap serangan, tetapi juga memiliki "pedang" untuk meyakinkan lawan bahwa biaya agresi akan jauh melampaui keuntungannya (Liff, 2024).

Sebagai bentuk nyata dari *internal balancing*, pemerintah Jepang telah menetapkan kebijakan peningkatan anggaran pertahanan yang sangat massif guna mendukung visi strategi 2022 tersebut. Jepang berkomitmen untuk meningkatkan belanja pertahanan menjadi 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2027, yang secara efektif mengakhiri kebijakan informal ambang batas 1% yang telah bertahan selama beberapa decade sebelumnya. Secara konkret, Program Pembangunan pertahanan menetapkan total pengeluaran sekitar 43,5 triliun Yen (setara ± USD 320 miliar) untuk periode 2023-2027 (Hughes, 2023). Alokasi ini difokuskan pada pengembangan kapabilitas *tand-off defense* melalui produksi massa rudal jelajah Tipe-12 yang ditingkatkan jangkauannya dan pembelian rudal Tomahawk dari AS, serta penguatan pertahanan siber, ruang angkasa, dan integrasi *artificial intelligence* dalam sistem komando (Ministry of Defense Japan, 2023).

Implementasi visi FOIP kini tidak lagi hanya bersandar pada bantuan ekonomi, tetapi telah terintegrasi secara fungsional dengan aktivitas militer dan bantuan keamanan untuk memperkuat tatanan regional. Memalui tabel di bawah ini, dapat dilihat bagaimana pilar-pilar FOIP diterjemahkan ke dalam tindakan pertahanan Jepang:

Pilar FOIP	Aktivitas Pertahanan/Keamanan	Tujuan Strategis
Supremasi Hukum & Keterbukaan	Latihan gabungan <i>Indo-Pacific Deployment</i> (IPD) dan patroli maritim bersama AS-Australia	Menjamin kebebasan navigasi dan menolak klaim maritim sepihak di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan melalui kehadiran fisik militer



Kemakmuran Ekonomi & Konektivitas	Program <i>Official Security Assistance</i> (OSA) dan transfer peralatan pertahanan (radar dan kapal patroli)	Membangun kapasitas negara mitra (<i>Maritime Domain Awareness</i>) untuk melindungi jalur perdagangan mereka
Perdamaian, Stabilitas & Keamanan	Penempatan unit rudal dan pertahanan udara di Kepulauan Nansei dan revisi NSS 2022	Menciptakan <i>military deterrence</i> terhadap eskalasi di Selat Taiwan

Sebagai negara *middle power* yang menghadapi keterbatasan militer dibandingkan Cina, Jepang menggunakan FOIP untuk mengonsolidasikan kekuatan di kawasan guna mencegah hegemoni tunggal (Liff, 2024). Namun, upaya pengembangan pertahanan ini berisiko memicu persepsi ancaman di pihak Cina, yang secara sistemik berpotensi menimbulkan *security dilemma*. Oleh karena itu, Jepang tetap mengedepankan kebijakan asertifnya dengan *Confidence Building Measures* (CBMs) dan diplomasi inklusif guna mencegah munculnya kepercayaan yang negatif di kawasan (Karisma et al., 2025). Melalui kombinasi antara penguatan infrastruktur dan modernisasi militer, Jepang berupaya mengembalikan keseimbangan strategis di kawasan demi mempertahankan tatanan internasional yang berbasis aturan (hukum internasional).

KESIMPULAN

Upaya Kementerian Pertahanan Jepang dalam mengimplementasikan *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) tahun 2023 merupakan manifestasi dari strategi *balancing* dalam konteks teori neorealisme. Jepang, sebagai *middle state*, berupaya untuk menyeimbangkan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik yang dipengaruhi oleh meningkatnya kekuatan Cina. Jepang, sebagai negara menengah, menyadari bahwa struktur anarki dalam sistem internasional mengharuskan setiap negara untuk melakukan *self-help* dalam menjaga keamanan dan kepentingannya. menggambarkan bagaimana Jepang menggunakan visi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) sebagai cara untuk menyeimbangkan kekuatan Cina di wilayah Indo-Pasifik.

Selain itu melalui kerjasama internasional, seperti melibatkan ASEAN sebagai mitra penting, Jepang mendorong tatanan regional yang inklusif melalui FOIP. Upaya ini memungkinkan negara Asia Tenggara untuk tetap netral dalam konflik geopolitik antara AS dan Cina. Jepang menempatkan dirinya sebagai kekuatan menengah yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan kekuatan di wilayah dengan menggunakan diplomasi, kerja sama internasional, dan memperkuat hubungan multilateral seperti Quad. Strategi ini tidak hanya menguntungkan perekonomian dan keamanannya sendiri, tetapi juga menciptakan sistem internasional yang adil dan aman di wilayah Indo-Pasifik.

Jepang berusaha membangun strategi kemitraan dengan Amerika Serikat, Australia, dan India untuk mencapai tujuan ini. Jepang secara tidak langsung dapat menyeimbangi potensi hegemoni Cina dan menciptakan tatanan wilayah yang lebih stabil melalui kerjasama internasional ini. Jepang menerapkan FOIP sebagai tindakan logistik dalam sistem internasional yang tidak stabil, di mana menjaga keseimbangan kekuatan dan keamanan adalah hal utama untuk menjaga stabilitas regional. Oleh karena itu, FOIP bukan hanya upaya diplomatik tetapi juga sebuah pendekatan yang menyeluruh untuk mengatasi masalah yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Abe, S. (2016). Toward Realizing “A Beautiful Country” through Economic Revitalization: The New Atage of Abenomics. Address to the Parliament of Japan.
- Adi, I. R. (2020). Keamanan Maritim dan Tantangan Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Amelia, R. (2023). Dinamika Persaingan Geopolitik Amerika Serikat dan Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik: Studi Kasus Sengketa Laut Tiongkok Selatan. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jakarta: UMJ Repository.



- Brown, J. D. J., & Kingston, J. (Eds.). (2018). *Japan's Foreign Relations in Asia*. London: Routledge.
- Dobrinskaya, O. A. (2022). Japan and Indo-Pacific Cooperation in the Quad. *Japan Review*, 5(2)
- Fathirahma, A. (2020). Kepentingan Stretegis Jepang dalam Pembentukan Kerangka Kerja Sama Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) pada Era Pemerintahan Shinza Abe. Universitas Indonesia. Depok: UI Library.
- Hughes, C. W. (2023). Japan's Grand Strategic Shift: The 2022 National Security Strategy. *Strategic Survey*, 123(1), 34-45.
- Jinping, Xi. (2013, September 7). Promote People-to People Friendship and Create a Better Future. Speech at Nazarbayev University, Astana, Kazakhstan. Diambil dari Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China: <https://www.fmprc.gov.cn/>
- Karisma, K., Burhanuddin, A., & Rahman, I. (2025). The Influence of Japan's Transformational National Security Strategy on East Asian Regional Security. *Journal of Peace, Security and Democracy*, 1(2).
- Laksono, Y. (2018). Kepentingan Jepang Dalam Normalisasi Militer Pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta: UMY Repository.
- Li, M. (2022). The Evolution of the Indo-Pacific Concept: From Asia-Pacific to a New Geopolitical Space. Dalam S. J. Wei & A. Tan (Eds.), *The Indo-Pacific: History, Theory and Practical Regimes*. Routledge.
- Liff, A. P. (2024). Japan's Defense Policy: The "Nansei Shoto" Shift and the Taiwan Factor. *Asian Security*, 20(1), 1-19.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Ministry of Foreign Affair of Japan. (2019). *Diplomatic Bluebook 2019: Japanese Diplomacy and International Situation in 2018*. Tokyo: Ministry of Foreign Affairs. <https://www.mofa.go.jp/files/000430632.pdf>
- Ministry of Defense Japan. Upaya-upaya Kementerian Pertahanan Jepang terkait Visi Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka (FOIP). 2018. https://www.mod.go.jp/en/d_act/exc/india_pacific/india_pacific-id.html
- Mustaqim, A. (2019). Normalisasi Militer Jepang: Perubahan Kebijakan Keamanan Jepang di Era Perdana Menteri Shinzo Abe. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta: UMY Repository.
- Pajon, C. (2019). Indo-Pacific Strategy: Shaping a Hybrid Regional Order. *War on the Rocks*. <https://warontherocks.com/2019/12/japans-indo-pacific-strategy-shaping-a-hybrid-regional-order/>
- Pangestu, L. G. (2020). Strategi Indonesia Mewujudkan ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) untuk Menciptakan Stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Sulaeman, F. H. (2020). ASEAN, the Quad, and China: A Security Contestation for the Indo-Pacific Region. *Jurnal Keamanan Kawasan*, 8(2).
- Waqaf Ilmu Nusantara. (2021). *Kebijakan Luar Negeri dan Dinamika Kawasan Indo-Pasifik*. Jakarta: Waqaf Ilmu Nusantara Press.
- Watanabe, T. (2019). *Japan's Vision of a Free and Open Indo-Pacific: As a Deterrent to China's Expansionism*. Tokyo: Sasakawa Peace Foundation.
- Watanabe, T. (2025, Januari). *Japan's Strategic Balancing: Efforts to Restore Regional Stability*. Tokyo: Sasakawa Peace Foundation.
- Yudhistira, A. (2024). Pembentukan dan Kerja Sama Quadrilateral Security Dialogue (Quad) antara Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India (2017-2023). Universitas Pelita Harapan.